

# PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MADRASAH DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

**Rahimi**

Podi PAI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681  
rahimi.plumat85@gmail.com

***Abstract:** The history of Islamic education in Indonesia has been started in the early XX century AD until today it is quite a long journey. Where quite drastic developments occurred during the old order and continued to develop during the new order. As an educational institution, madrasas are institutions that grow and develop by and from society, as well as for societies that are full of Islamic cultural meanings, whether they are recognized or not, madrasas have traveled a long journey of civilization in realizing the formation of a national personality which is full of changes, however madrasas are reluctant to let go of their original meaning in accordance with their cultural ties, namely Islamic culture.*

***Keywords:** Madrasah, Renewal, Islamic Education.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Mahmud Yunus.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh Negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatlan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.<sup>1</sup>

Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat jenjang pendidikan pada system madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedia*, (Jakarta,1993), h. 78

1. Pertama Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun
2. Kedua Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun
3. Ketiga Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun.<sup>2</sup>

Dalam proses belajar mengajar di madrasah, “guru merupakan orang yang paling utama bagi anak didik, karena guru merupakan sebagai panutan bagi kelangsungan pendidikan dan pengajaran”.<sup>3</sup> Guru mempunyai peranan dan fungsi yang “berkaitan erat dengan pelaksanaan pengajaran, justru karena itu kualitas guru sangat penting sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa, untuk menciptakan akhlak anak didik, sangat tergantung dari kualitas akhlak guru itu sendiri, kemudian barulah bisa diterapkan kepada anak didik sebagai panutan yang harus diikuti.

Pada prinsipnya guru “memiliki banyak peranan, baik yang berkaitan dengan dinas maupun diluar dinas, yaitu dalam bentuk pengabdian.”<sup>5</sup> Karena manusia yang hidup bertugas sebagai guru, namun tergantung pada tingkat kewenangan yang dimiliki. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis peranan guru, yakni peranan dalam bidang profesi, peranan kemanusiaan dan peranan dalam bidang kemasyarakatan.

Peranan guru sebagai profesi meliputi tiga unsur, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohd. Uzer Usman, berikut ini: Peranan guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan kererampilan-keterampilan kepada anak didik.<sup>6</sup>

Dengan demikian peranan guru sebagai profesi lebih dititik beratkan pada kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Berarti pula setiap guru secara langsung padanya tiga peranan sekaligus, yaitu sebagai pendidik,

---

<sup>2</sup> Husni Rahim, *Arah Baru pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Islam, 2001), h.41

<sup>3</sup> Mar'at, *Keteladanan Guru*, (Jakarta Timur: Ghia Indonesia, 1997), h. 47

<sup>4</sup> Hujair AH. Sanaky, “*Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah*” Jurnal, tahun 2005, h. 25

<sup>5</sup> Abu Bakar Ahmad As-Sayyid, *Kepada Para Pendidik Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1991), h.27.

<sup>6</sup> Mohd.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.4

pengajar dan pelatih yang bertujuan untuk mendewasakan anak didik dalam berbagai aspek kehidupan termasuk salah satunya pendidikan akhlak.

Diantara beberapa peranan tersebut yang paling penting untuk dilaksanakan adalah peranan sebagai pendidik. Yaitu guru harus mengusahakan semaksimal mungkin untuk “mewariskan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan konsep/falsafah hidup bangsa”.<sup>7</sup> Berusaha mewujudkan sikap dan tingkah laku atau akhlak anak didik kearah yang lebih baik, yang diterapkan melalui pengajaran PAI dan melalui keteladanan guru yang ditampilkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Mumtahanah ayat 6.

Misalnya dalam hal berpakaian, guru memberikan contoh kepada anak didik melalui sikap pakaiannya yang sopan seperti berbusana muslimah bagi guru wanita. Hal yang demikian menjadi teladan bagi anak yang selanjutnya untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti ini bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum, kebijakan seperti itu untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa orde lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga professional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang professional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Di Indonesia pendidikan Islam telah bergabung sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, dilaksanakan secara tradisional. Setelah memasuki awal abad

---

<sup>7</sup> Husni Rahim, *Arah Baru pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Islam, 2001), h.41

ke dua puluh dikalangan dunia islam termasuk Indonesia telah dimasuki oleh semangat pembaharuan, digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan dan pencerahan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat “Deskriptif” yaitu suatu penyelidikan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa kini yang sesuai dengan keadaan yang ada menurut pokok bahasan. Metode penelitian yang relevan dengan konteks kekinian, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Reflektif Konstektual, yaitu teori yang ditemukan dalam buku-buku dianalisis sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu dengan tehnik membaca buku-buku, majalah-majalah dan karangan ilmiah lainnya guna untuk menemukan dasar-dasar teoritis yang dapat mendukung data yang diperoleh.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pengertian dan Perkembangan Madrasah di Indonesia**

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, madrasah adalah sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam),<sup>8</sup> sedang menurut ewb resmi Kementerian Agama Direktorat Pendidikan Madrasah, madrasah dalam bahasa arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (zharaf makan) dari akar kata “darasa”. Secara harfiah “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”. Dari akar kata “darasa” juga diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau tempat belajar”; kata Al-midras juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab taurat”.<sup>9</sup>

Dari dua pengertian di atas, maka madrasah dikenal juga dengan istilah sekolah dalam bahasa Indonesia. Istilah sekolah juga merupakan serapan bahasa asing dari school atau sekolah. Madrasah sebenarnya identik dengan sekolah

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbesarbahasaindoneia.org/madrasah>, diakses tanggal 15 September 2016

<sup>9</sup> Situs resmi Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, <http://madrasahkemenag.go.id/detail38.html>, diakses tanggal 15 September 2016

agama dan karakteristik berbeda dengan sekolah umum, namun kekinian madrasah lebih dikenal dengan sekolah dengan muatan pembelajaran agamanya lebih banyak. Secara teknis dan prakteknya, madrasah tidak berbeda dengan sekolah formal. Bahkan bisa jadi kritik bahwa di setiap akhir tahun ajaran menjelang ujian nasional, madrasah terasa sangat formal, mengesampingkan pembelajaran agama. Tujuannya ‘sukses’ dalam ujian nasional.

Menurut Wikipedia, madrasah pertama sepanjang sejarah Islam adalah rumah Abu Abdillah al-Arqam, bin Abi al-Arqam, tempat ilmu pengetahuan dan amal saleh diajarkan secara terpadu oleh nabi akhir jaman, Nabi Muhammad SAW. Ia sendiri yang mengajar dan mengawasi proses pendidikan disana, para As-Sabiqun al-Awwalun adalah merupakan murid-muridnya.<sup>10</sup> Siapa Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam, menurut Abdul Mun'im Muhammad dalam Khadijah Ummul Mu'minin Nazharat Fi isyari Fajril Islam, halaman 96 dan 155. Seperti yang dikutip id.wikipedia.org adalah seorang pengusaha yang berpengaruh dari suku Makhzum dari kota Makkah. Dalam sejarah islam, dia orang ketujuh dari As-Sabiqun al-Awwalun. Rumahnya berlokasi dibukit safa, ditempat inilah para pengikut Muhammad belajar tentang islam. Sebelumnya rumah al-Arqam ini disebut Dar al-Arqam (rumah Al-Arqam) dan setelah ia masuk islam akhirnya disebut Dar al-Islam (rumah islam). Dari rumah inilah madrasah pertama kali ada. Al-Qur'an juga ikut hijrah bersama dengan Muhammad ke Madinah.<sup>11</sup>

Para ahli sejarah pendidikan seperti A.L. Tibawi dan Mehdi Nakosteen, seperti yang dikutip Web resmi Direktorat Pendidikan Madrasah, mengatakan bahwa madrasah (bahasa Arab) merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia islam (klasik) pra-modern. Artinya, secara istilah madrasah dimasa klasik Islam tidak sama terminologinya dengan madrasah dalam pengertian bahasa Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam menulis kata tersebut secara bervariasi misalnya, schule atau hochschule (jerman), school, college atau academy (Inggris).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah>, diakses tanggal 15 September 2016

<sup>11</sup> Wikipedia, Khadijah Ummul Mu'minin Nazharat Fi isyari Islam, h.96 dan 155, <http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah>, lihat juga <http://matgembul.wordpress.com/tag/khadijah-ummul-muminin-nazharat-fi-isyraqi-fajril-islam/> tanggal 15 September 2016

<sup>12</sup> Situs Resmi Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, <http://madrasah.kemenag.go.id/detail38.html>, diakses tanggal 15 September 2016

Perkembangan madrasah di dunia islam terkait erat dengan berkembangnya secara luas pengetahuan dan pemikiran yang dikenal dengan mazhab. Berkembangnya pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadits, seperti ilmu al-Qur'an, hadits, fiqih, ilmu kalam, maupun ilmu tasawwuf tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan.<sup>13</sup> Hal ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya aliran-aliran saling berebutan pengaruh di kalangan umat islam, dan berusaha mengembangkan aliran dan mazhabnya masing-masing. Maka terbentuklah madrasah-madrasah dalam pengertian kelompok pikiran, mazhab atau aliran. Itulah sebabnya sebagian besar madrasah didirikan pada masa itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang masyur pada masanya, misalnya madrasah Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah atau hanbaliyah.<sup>14</sup> Dalam sejarahnya, madrasah adalah saksi perjuangan pendidikan yang tak kala henti. Pada jaman penjajahan belanda madrasah didirikan untuk semua warga. Sejarah mencatat, madrasah pertama kali berdiri di Sumatera, madrasah Adabiyah (1908, dimotori Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari madrasah school, madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim Amrullah di padang panjang (1907). Lalu madrasah Nurul uman didirikan H. Abdul Somad di jambi. Madrasah berkembang di jawa mulai 1912.<sup>15</sup> Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidayah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (mulai 1919), ada madrasah yang mengaproisasi system pendidikan belanda plus, seperti muhammadiyah (1912) yang mendirikan madrasah Ibtidayah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muamillin dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di jabar yang mengembangkan madrasah pertanian, itulah singkat tentang sejarah madrasah di

---

<sup>13</sup>Sejarah berdirinya Madrasah, <http://blog.uin-malang.ac.id/gudangmakalah/2011/10/28/sejarah-berdirinya-madrasah/#more-224>, diakses tanggal 15 September 2016

<sup>14</sup> Darmuin, *Prospek*, h.90

<sup>15</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.89

Indonesia.<sup>16</sup> Pengembangan madrasah erat kaitannya dengan pengembangan potensi kepribadian manusia. Abdul Rachman Shaleh menjelaskan dalam “Madrasah dan pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi”, bahwa pengembangan kepribadian manusia meliputi:<sup>17</sup>

1. Pengembangan iman, yang diaktualisasikan dalam ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga menghasilkan kesucian.
2. Pengembangan cipta, untuk memenuhi kebutuhan hidup materiil dan kecerdasan, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini menghasilkan kebenaran.
3. Pengembangan karsa, untuk mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik (etika, akhlak, dan moral). Pengembangan ini menghasilkan kebaikan.<sup>18</sup>
4. Pengembangan rasa, untuk berperasaan halus, (apresiasi seni, persepsi seni, kreasi seni). Hal tersebut menghasilkan keindahan
5. Pengembangan karya, untuk menjadikan manusia terampil dan cakap teknologi yang berdayaguna sehingga menghasilkan kegunaan
6. Pengembangan hati nurani diaktualkan menjadi budi nurani yang berfungsi memberikan pertimbangan (iman, cipta, karsa, rasa, karya,) sehingga menghasilkan kebijaksanaan.<sup>19</sup>

Sehingga dalam pengertian pengembangannya, pengembangan madrasah dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjadikan madrasah yang islami, populis dan berkualitas. Dimaksudkan sebagai proses atau cara menjadikan madrasah besar, mekar dan mengembang, dalam arti bertambah banyak dan semakin sempurna dalam mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kebodohan dan melatih keterampilan peserta didik (siswa) untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan masa depan dengan

---

<sup>16</sup>Madrasah di Indonesia dan madrasah Bagi Indonesia  
<http://selatanciamis.blogspot.com/2009/12/madrasah-di-indonesia-dan-madrasah-bagi.html>, diakses tanggal 15 September 2016

<sup>17</sup>Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.12

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.34.

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh berupa: kesucian iman, kebenaran cipta, kebaikan karsa, kegunaan karya, dan kebijaksanaan hati nurani.<sup>20</sup>

Madrasah dituntut agar selalu berproses untuk menjadi besar, mekar dan mengembang, dalam arti bertambah banyak dan semakin sempurna dengan tujuan mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, melenyapkan kebodohan serta membekali anak didik dengan kompetensi di atas untuk menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan perubahan-perubahan di berbagai sector kehidupan, termasuk juga adalah Globalisasi, dengan tidak meninggalkan dasar Agama Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam pengembangannya, madrasah tentu tidak bisa melewatkan hal-hal yang mendasar sebagai sebuah lembaga yang mengelola manusia sebagai asset Agama dan Bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok dan mendasar terhadap madrasah adalah sebagaimana terdapat pada visi madrasah, yaitu "Islami, Populis, Berkualitas, dan Beragam".<sup>21</sup> Oleh karena itu, format madrasah dari waktu telah mengalami perkembangannya hingga semakin jelas sosoknya, dari madrasah yang berawal dari unsur tradisional, siswa, hingga menjadi negeri, dan dari tingkat rendah (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidayah), hingga madrasah lanjutan (Madrasah Tsanawiyah sebagai lanjutan tingkat pertama dan madrasah Aliyah sebagai lanjutan tingkat atas).<sup>22</sup>

Populis merupakan gambaran bahwa madrasah iu lahir dan dibesarkan oleh dan untuk masyarakat. Visi ketiga Berkualitas; artinya berorientasi pada mutu. Hal ini merupakan tantangan masa depan yang sangat nyata, Karena penghargaan masyarakat terhadap sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan itu tercermin dalam dua tataran : proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika gagal

---

<sup>20</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa...*,h.39

<sup>21</sup>Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu,1999), h.34

<sup>22</sup> Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan ...*, h.39

dalam mewujudkan visi ini, madrasah akan tertinggal dari lembaga-lembaga pendidikan lain. Berkualitas dicerminkan pada kegiatan dan nilai akademik yang diperoleh madrasah tersebut. Baik yang dapat dan dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai pada ulangan, kenaikan kelas, ujian akhir, maupun ujian masuk perguruan tinggi (UMPTN).<sup>23</sup>

### **Problem Pendidikan Madrasah di Indonesia**

Sebagai upaya inovasi dalam system pendidikan islam, madrasah tidak lepas dari berbagai problema yang dihadapinya, apalagi dalam menghadapi era globalisasi, maka problem pun akan semakin komplit, diantara problema-problema tersebut, menurut Darmu'in antara lain:<sup>24</sup>

1. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentifikasi dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relative sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan system klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.

Dengan demikian, sebagai sub system pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek pensejajaran madrasah dengan sekolah umum yang berakibat berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan islam. Beberapa permasalahan yang muncul kemudian, antara lain:

1. Berkurangnya muatan materi pendidikan agama. Hal ini dilihat sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama, karena muatan kurikulum agama

---

<sup>23</sup>Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia...*, h..36

<sup>24</sup>Darmuin, *Prospek Pendidikan islam di Indonesia: Suatu Telaah Terhadap Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002), h.18

sebelum SKB dirasa belum mampu mencetak muslim sejati apalagi kemudian dikurangi

2. Tamatan madrasah serta tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.<sup>25</sup>

Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan Negara, memunculkan dualisme system pendidikan di Indonesia.<sup>26</sup> Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilemma yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan system pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan bukan ilmu islam (kafir). Padahal dikhotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya.<sup>27</sup>

Dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang manjerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan (atau pengurus). Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana, sering di dalam praktik terjadi overlapping. Masalah ini biasanya lebih buruk jika diantara pengurus yayasan tersebut ada yang menjadi staf pengajar. Disamping ada kesan memata-matai kepemimpinan kepala madrasah, juga ketika staf pengajar tersebut melakukan tindakan indisipliner (sering datang terlambat), kepala madrasah merasa tidak berdaya menegurnya.<sup>28</sup>

Praktek manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional, yakni model manajemen paternalistic atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini

---

<sup>25</sup> Husni Rahim, *Madrasah*, h.39

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.78

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.90

<sup>28</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.IV,(Jakarta: Bumi Aksara,1996), h.81

mengarah pada ujung ekstrem negative, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.<sup>29</sup>

Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh departemen yaitu Departemen pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) atau sekarang disebut dengan Kementerian Agama (Kemenag) pembinaan Madrasah dibawah naungan Kemenag berhadapan dengan sekolah umum dibawah pembinaan Depdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan, manajerial, bantuan buku, dan media pembelajaran, serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Depdiknas) dengan Madrasah (Kemenag).

Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kulaitas input siswa, dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Yang demikian ini Karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait (Malik Fadjar, 1998).<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Jazuli Zuwaini bahwa permasalahan yang dihadapi madrasah saat ini, diantaranya adalah : adanya hegemoni yang menyebabkan kurikulum madrasah terlalu padat; adanya diktomi kebijakan dalam hal anggaran dan standar pengelolaan (khususnya evaluasi/penilaian terutama pelaksanaan UN); rendahnya kualitas sarana-prasarana madrasah, serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (TPK) yang belum memenuhi standar serta munculnya beberapa permasalahan yang terjadi pada guru Madrasah, diantaranya: kepastian hukum dan jaminan masa depan; prestasi siswa belum optimal; kurangnya akses

---

<sup>29</sup>Arief Furchan, *Tranformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Mia, 2004),h.32

<sup>30</sup>Mustofa Syarief dan Juanda Abubakar (eds), *Visi Pembaruan Pendidikan Islam H.A. Malik Fadjar*, (Jakarta:LP3NI,1998), h.19

pendidikan; status dan kelembagaan; lemahnya integrated and comprehensive grand desain; mengejar aspek legal formal serta kurangnya peranan regulasi.<sup>31</sup>

Jazuli Juwaini, juga menyatakan bahwa ada tiga peran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap madrasah berkaitan dengan UU Sisdiknas, Nomor 20/2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yakni:

**Pertama**, peran rekognisi (pengakuan), hal ini nampak jelas pengakuan terhadap lembaga Madrasah secara kelembagaan baik swasta maupun negeri sama dengan sekoalah umum lainnya.

**Kedua**, peran Fasilitasi (bantuan), sudah Nampak, sekalipun terus diperjuangkan secara bertahap, agar lebih mendekati pada tingka kelayakan.<sup>32</sup>

**Ketiga**, Peran Regulasi (pengaturan), Nampak masih kurang untuk madrasah, terutama setelah lahirnya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Bahwa system Pendidikan Nasional dilaksanakan secara Semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku bagi seluruh wilayah Negara. Adapun menyeluruh bearti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Termasuk pendidikan di madrasah dan ponpest yang diselenggarakan/dibina oleh Kementerian Agama dan selama ini dikenal dengan Lembaga Pendidikan Agama. Sedangkan Terpadu bearti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan pembangunan nasional.<sup>33</sup>

Selanjutnya diantara bentuk regulasi pemerintah terhadap madrasah dapat diaktulisasikan dengan menghadirkan tiga desain besar pendidikan madrasah: (1) Madrasah Unggulan (2) Madrasah Model, dan (3) Madrasah Kejuruan dan Reguler.

Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola system pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Kurikulum mulaii dibicarakan bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan peningkatan kualitasnya. Sejak saat ini, banyak perubahan-perubahan besar di madrasah kini tidak hanya terjadi pada kurikulum silabusnya dengan literature yang baru, akan tetapi wawasannya juga berubah. Pendidikan di

---

<sup>31</sup>Jazuli Juwaini, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bening Citrakreasi Indo, 2011), h. 31

<sup>32</sup>*Ibid.*, h.,31

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 32

madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dan status social mereka di masa mendatang. Ijazah formal madrasah, ijazah hasil ujian persamaan negeri menjadi amat penting dan berpengaruh mengubah pandangan ke arah duniawi.<sup>34</sup>

Untuk merevitalisasi kondisi Pendidikan Madrasah perlu keseriusan Pemerintah dan keterlibatan semua pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya Madrasah bermutu serta dapat menjalankan peran-peran strategisnya. Melihat kondisi dan realitas yang ada beberapa komponen yang harus segera dibenahi oleh madrasah, menurut Jazuli Juwaini, yaitu:<sup>35</sup>

**Pertama**, Meningkatkan Kualitas Prasarana dan Sarana Madrasah. Maka Direktorat Madrasah Kemenag RI atau Bidang Mapedu/Pendis melakukan berbagai solusi diantaranya : Melakukan rehalibitasi ruang kelas yang rusak dengan target hingga 50% dari jumlah tersebut; Melakukan pembangunan madrasah baru maupun dengan ruang kelas baru serta pengembangan madrasah terpadu; Penyelenggaraan kelas layanan khusus bagi siswa/anak didik yang belum mendapatkan akses pendidikan. Dan meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) yang belum memenuhi standar.

**Kedua**, Mengoptimalkan potensi dan prestasi siswa, diantaranya: Melalui kompetensi dan expo madrasah serta memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan untuk mengadakan kegiatan dalam upaya peningkatan prestasi siswa.

**Ketiga**, Perluasan terhadap akses pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Pembangunan Madrasah terpadu, madrasah baru dan RKB (ruang kelas baru); memperluas kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan dasardengan paket A dan B; pemberian beasiswa dari ekonomi kurang mampu dan penggunaan TIK dengan mengakses internet.

**Keempat**, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Harus dilakukan secara konsisten untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik dan perkembangan madrasah secara berkesinambungan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.39

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.40

**Kelima,** Kebijakan Pemerintah yang mendukung madrasah, diantaranya sebagian besar atau sekitar 90% anggaran dialokasikan untuk madrasah swasta, terutama peningkatan mutu gur, khususnya non PNS lebih besar.

**Keenam,** Pengembangan kurikulum dan standarisasi yang sesuai, diantaranya dengan memperhatikan standarisasi pendidikan madrasah-pesantren harusnya berpangkat pada visi madrasah-pesantren sebagai lembaga pendidikan yang alim wa mufaqihfiddin dan masyarakat santri yang religi berwawasan santri dan senantiasa menjadi rahamatan illahi bagi lingkungannya.<sup>36</sup> Sementara itu, menurut Mastuhu dalam memperdayakan system pendidikan Islam,<sup>37</sup> bahwa dewasa ini muncul paradigma sekolah/madrasah unggulan yaitu sekolah/madrasah yang lulusannya memiliki kemampuan memahami fenomena baru (copying), mengakomodasi perkembangan baru (acomodating), mengantisipasi perkembangan baru (anticipating), mengarahkan masa depan (reorieting), memilah dan memilih berbagai alternative (selecting), mengarahkan (managing), dan mengembangkan (developing). Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan kemampuan berijtihad memahami ajaran Islam secara benar, mendalam dan utuh serta diperlukan perubahan dari paradigma baru.<sup>38</sup>

Selanjutnya, sekian banyak permasalahan madrasah seyogyanya tidak membuat madrasah semakin terpinggirkan. Harus ada upaya melaksanakan revitalisasi pendidikan madrasah baik pemerintah, masyarakat dan madrasah itu sendiri. Revitalisasi madrasah terutama dalam hal kebijakan dan regulasi. Dengan berbagai perubahan yang signifikan terhadap kondisi pendidikan madrasah. Sehingga dengan demikian peningkatan mutu madrasah dan madrasah bermutu menjadi sebuah keniscayaan di tengah-tengah pergulatan dan aksi pendidikan Indonesia.

Dalam menghadapi begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh madrasah di Indonesia, Darmuin mencoba memberikan solusi dari problematika madrasah tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.90

<sup>37</sup> Mastuhu, *Memperdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 24

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 98

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 100

**Pertama**, bagaimana semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ini secara serius memperhatikan sarana penunjang pendidikan yang dibutuhkan anak didik di madrasah. Diantaranya rasio kebutuhan buku paket atau buku pegangan siswa, laboratorium dan sarana pendukung lainnya. Seperti perpustakaan yang sangat minim dibanding pendidikan umum.

**Kedua**, merancang pola rekrutmen guru dalam rangka menyediakan tenaga guru yang memenuhi standarisasi, kualifikasi, dan kompetensi dibidang pendidikan, serta berdedikasi tinggi.

**Ketiga**, tampaknya perlu dimulai dipikirkan subsidi silang, swastanisasi terhadap sekolah-sekolah negeri (umum) yang sudah mapan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Sehingga dalam berbagai bentuk subsidi dapat dialokasikan secara seimbang kepada sekolah-sekolah yang masih terpinggirkan, khususnya kepada madrasah yang selama ini lebih banyak bergantung kepada swadaya masyarakat.<sup>40</sup>

**Keempat**, tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan madrasah, sebab, itu akan menimbulkan kekeliruan pemahaman dikalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa.

**Kelima**, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memosisikan diri, peran serta partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan secara utuh, sebagaimana pada awal-awal keberadaan madrasah, apalagi bila mampu menyediakan orang tua asuh bagi siswa yang kurang mampu.<sup>41</sup>

Adapun kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib madrasah kedepan, setidaknya perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Tidak merugikan ciri khas Agama islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, baik Karena perubahan sosila-politik, pergantian decision maker, dan sebagainya.<sup>42</sup>
2. Tidak ada lagi deskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum, termasuk misalnya, diskriminasi dalam hal anggaran.pengaturan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 109

<sup>41</sup>Darmuin, *Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah Terhadap Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Semarang, 2002), h.24

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 347

dana antara pendidikan di bawah Depdiknas dan Depag hanyalah masalah teknis procedural yang diharapkan bisa diatur. Misalnya, melalui upaya memperjelas prosedur tentang anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan keadilan dalam distribusi maupun kualitasnya.

3. Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun selama ini madrasah berada langsung dibawah pusat. Sebab bagaimanapun persoalan pendidikan adalah persoalan universal, dan merupakan investasi jangka panjang.<sup>43</sup>
4. Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional maka Depag perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, disamping meningkatkan akuntabilitas lembaganya.<sup>44</sup>

### **Kedudukan Madrasah Sebagai Lembaga Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia**

Di Indonesia, pada awal berdirinya sebagian besar madrasah masih lebih banyak memberikan ilmu-ilmu keagamaan dari pada ilmu-ilmu umum, namun terjadi perubahan setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu menteri agama, menteri pendidikan, dan menteri dalam negeri, yang berisi ketentuan agar semua madrasah mengubah kurikulumnya menjadi 70% bidang umum dan 30% bidang studi agama. Hal ini berlaku bagi madrasah negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sedangkan madrasah yang dikelola oleh swasta, terdapat beberapa variasi yakni 60 % bidang studi agama dan 40% bidang studi umum, dan ada pula yang tetap yakni 70% bidang stuid agama dan 30% bidang studi umum.<sup>45</sup>

Madrasah adalah tempat pendidikan dan memberikan pendidikan dan pengajaran ang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga pendidikan islam yang termasuk kedalam kategori madrasah antara lain madrasah Ibtidayah (MI), madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 349

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.29

madrasah mu'allimin, madrasah mu'allimat, serta madrasah diniyah. Istilah madrasah di Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, namun di Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam.<sup>46</sup>

Pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan melalui pendidikan keagamaan berada dibawah koordinasi Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Dedi mengatakan bahwa lembaga pendidikan keagamaan ini juga adalah merupakan salah satu sarana pendidikan agama dan budi pekerti, karena pendidikannya berpusat pada agama.<sup>47</sup> Pada madrasah, paling tidak ada dua kepentingan bertemu, yaitu hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperan serta dalam pendidikan dan motivasi keagamaan yang menyertai. Indikasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa banyak madrasah (pada awalnya) berafiliasi dengan pondok pesantren.<sup>48</sup>

Adapun kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan). Namun demikian perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai "forgotten Community", pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan *Center for Informatics data and Islamic Studies* (CIDIES) Kementerian Agama dan data base EMIS (*Education Management Sistem*) Dirjenn Pendidikan Islam Kemenag, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidayah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/Ma (SMA) sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren).dari jumlah itu 90,08% berstatus swasta dan hanya 9,92% yang berstatus negeri.

---

<sup>46</sup> Moh. Padil dan Angga Teguh Prasetyo, *Strategi Pengelolaan SD/MI Visioner*, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), h.87-88.

<sup>47</sup> Dedi Supriadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), .h.130

<sup>48</sup>*Ibid.*, h.137

Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya. Karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah.<sup>49</sup>

Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup, bahkan sering disebut *Ia yamutu wala yahya* (tidak hidup dan perlu banyak biaya agar tidak mati). Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik, hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun.<sup>50</sup> Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (Sisdiknas) pasal 3 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>51</sup>

Menyikapi system pendidikan nasional yang dikembangkan di Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Pendidikan Islam sangat mempengaruhi system tersebut. Pendidikan Islam sangat mendukung system pendidikan nasional. Hal ini juga secara sepintas bisa dilihat dalam tujuan pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dilakukan dalam pendidikan Islam.<sup>52</sup>

## Kesimpulan

Problema Kedudukan Madrasah dalam system Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>49</sup> Darmuin, *Prospek Pendidikan Islam...*,h.20

<sup>50</sup>Tobroni, *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah*, (Sebuah tulisan yang dibuat untuk menanggapi kebijakan yang disampaikan oleh Prof. Dr.Yahya Umar, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama), (Situs:emiardiyanti.blogspot.co.com,2009),diakses: 15 Juni 2016

<sup>51</sup> Darmuin, *Prospek Pendidikan Islam...*,h.89

<sup>52</sup> Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan,1998),h.31

(SPN), Madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya, Namun demikian perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah dianggap masih kurang, maka dalam hal ini Pemerintah juga terus berupaya memberikan perhatian terhadap Madrasah, karena madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik, hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ketahun. Di sisi lain, dari segi substansi pendidikan agama, kelompok mata pelajaran agama telah memperoleh apresiasi yang sangat tinggi dalam system pendidikan nasional, intinya adalah bahwa, setiap satuan pendidikan wajib memberikan pendidikan agama kepada seluruh peserta didik sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik.

### Daftar Pustaka

- Afifuddin, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: Profect, 2007.
- Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia (Pengantar Antropologi Agama)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Al-Attas Syed Muhammad Naquib dalam Daud Wan Mohd Nor Wan, *The Educationsl Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Terj. Hamid Fahmy et. All, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*, Bandung: Mizam, 1998.
- Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Cet.II, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet.I, Jakarta: Logos, 1999.
- Assegaf Abd.Rahman, *Pengantar Dalam Buku Pendidikan Islam Integratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azra Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekontruksi dan Demokratisasi*, Cet.II, Jakarta: Kompas, 2006.
- Asrohah Hanun, *Samara Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Denim Sudarwan, *Agenda Pembaharuan System Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Echols John M. dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris-indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama, 1992.

- Habullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Oers, 2006.
- Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hofmann Murad W, *Menengok Kembali Islam kita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Ismail Faisal, *Masa Depan Pendidikan Islam Di tengah Kompleksitas tantangan Modernisasi*, Jakarta: Bakti Aksara Persada, 2003.
- Kosim Moh, *Pengantar Ilmu Pendidikan, Pamekasan*, STAIN Pamekasan Press, 2006.
- Machali Imam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume I, Nomor 1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Mas'ud Abdurrahman, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta: Gama Media, 2012.
- Matry M.Nuridin, *Implementasi Dasar-dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*, Makassar: Aksara Madani, 2008.
- Muchtar Heri Jauhari, *Fiqh Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudyaharjo Redja, *Pengantar Pendidikan Cet.I*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Muliawan Jasa Ungguh, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: Pustaka Belajar, 2004
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1979.
- Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran Sang Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2003
- Nasution S, *Sejarah Pendidikan Nasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nata H. Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nizar Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Poerwadaminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insan, 2004.
- Rahardjo M.Dawan, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Paramida, 1996.

- Rahman Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 2003.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Rukiati Enung K, et all, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, tt.
- Salim Moh. Haitami & Kurniawan Syamsul, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Sardar dan Ziauddin, *Science, Technology and development in muslim World*, Terj.Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1989.
- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Steenbrik Karel A, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*, Jakarta: Dharma Aksara Perkasa, 1986.
- Suharman Dagus, *PP No.55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, (Online), diakses 12 Oktober 2013.
- Suheriyanto Dwi, *Memadu Sains dan Agama: Menuju Universitas Islam Masa Depan*, Malang: Bayumedia dan UIN Malang Press, 2004.
- Sutedjo Muwardi, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen. Binbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1992.
- Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syaifuddin Amrullah, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islami*. Bandung: Mizan, 1991.
- Ummi, *Islamisasi Sains Perspektif UIN Malang*, (Majalah Mahasiswa UIN: Malang, 2005)
- Wicaksono Bayu, *UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Online), diakses melalui situs: <http://repository.unila.ac.id/16/> 14 September 2015.
- Wiyani Novan Ardy & Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam (Rancang Bangun Pendidikan Monokotomik-Holistik)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Zainuddin M, *Paradigma Pendidikan Terpadu Menyiapkan Generasi ulul albab*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Zuhaili Muhammad, *Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini*, Jakarta: A.H Ba'dillah Pres, tt.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.